

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Amar, Ihsan, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Sinjai*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.
- Amin, Fakhry. dkk. *Ilmu Perundang-Undangan*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Arifin, Arini Indika, *Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, Volume 3 No.1 (2015), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/7072>
- Askolani, KASI Pemerintahan Desa di Desa Sodong, wawancara dengan penulis di kantor Desa Sodong, pukul 15.30 WIB, tanggal 11 Februari 2025.
- Badan Pusat Statistik, *Jumlah Desa1/Kelurahan Menurut Provinsi 2023*, *Badan Pusat Statistik*, diakses 15 Oktober 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YkVWWFUyNTJTVTloVGpCeFdFVTNaMk5wUzFaUFFUMDkjMw==/jumlah-desa-kelurahan-menurut-provinsi--2022.html>
- Barus, Anjeli Ade Irma Suryani, Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Dana Desa pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum*, Volume 10, No. 2, (2024), <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/940/19>.
- Bhakti, Astera Primanto, *Buku Pintar Dana Desa*, Jakarta Pusat: Call Center Dering DJPK 1500420, 2019.

BPK RI, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *BPK RI*, diakses pada 27 Mei 2025, <https://peraturan.bpk.go.id>

BPK RI, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *BPK RI*, diakses pada 27 Mei 2025, <https://peraturan.bpk.go.id>

Desa, RPJM. *Dokumen Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) 2021-2027 Desa Sodong Kecamatan Saketi'*, Pandeglang: RJM DESA, 2021.

Deski, Ahmad, *Maqashid Syariah Menurut Abdul Abdul Wahab Khalaf'*, *Al Furqan*, Volume 7 No.1 (2022), <https://ejournal.staidapayakumbuh.ac.id/index.php/alfurqan/article/view>.

Gunawan, Indra, dkk, Penyebab Tingginya Kasus Korupsi Dana Desa dalam Sudut Pandang Teori Struktural Fungsional Talcot Parson (Study Literatur), *Journal Of Human And Education (JAHE)*, Volume 4 No.4 (2024), doi:10.31004/jh.v4i4.

Harianto, Mudji Rahardjo, dkk, *Pengelolaan Dana Desa dan Tindak Pidana Korupsi (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya)*, Surabaya: UD. Dalle Nurul Utama, 2022.

Hasanuddin, Muhammad Helmi, dkk, Kebijakan Hukum Pidana pada Korupsi Dana Desa, *Banua Law Review*, Volume 5 No.1 (2023), <https://kalsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/202/05/balrev-kebijakan-hukum-pidana-pada-korupsi-dana-desa.pdf>.

Indika Arifin, Arini, Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, *LexetSocietatis*, Volume 3 No.1 (2015), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/%20lexetsicietatis/article/download/7072/6585>.

Isman, Muhammad Ismunanda, *Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Juanitha, Callychya, dkk, Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang, *Ilmu Perundang-Undangan*, Volume 1 No.3 (2021), <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/>.

Karmila, Reva Harzarina, dkk, Akibat Hukum Pengelolaan Keuangan Desa yang Tidak Dipertanggung Jawabkan oleh Kepala Desa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, *Media Akademik*, Volume 2 No.1, (2024), <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/797>.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Desa Antikourupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021.

Mahfudi, Ahmad, RT di Desa Sodong, wawancara dengan penulis di rumahnya di Desa Sodong, pukul 16.30 WIB, pada tanggal 11 Februari 2025.

Maria, Mery, Kepala Urusan Keuangan Desa di Desa Sodong, wawancara dengan penulis di kantor Desa Sodong, pukul 14.30 WIB, tanggal 11 Februari 2025.

- Marzuki, Peter Muhammad, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Mayasari, Ela, *Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 29/Pid.sus-TPK/2020/PN Smg.)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.
- Natasyah, Indah Nurhazlin, dkk, Efektivitas PP No. 43 Tahun 2024 tentang Desa terhadap Tingginya Kasus Korupsi Dana Desa Perspektif Fiqh Siyasa, *Jurnal Hukum*, Volume 5 No. 4 (2023), <https://ask.orkg.org/item/578220814/EFEKTIVITAS-PERATURAN-PEMERINTAH-NO.-43-TAHUN-2014-TENTANG-DESA-TERHADAP-TINGGINYA-KASUS-KORUPSI-DANA-DESA-PERSFEKTIF-FIQH-SIYASAH>.
- Oktaviani, Lia, *Peran Kepala Desa Musi Banyuasin dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi terhadap Keuangan Desa Ditinjau dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2022.
- Pareda, Marlin, Jullie J, dkk, Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, *Riset Akuntansi dan Auditing : Goodwill*, Volume 8 No. 2. (2017), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/>.
- Prihatmanto, Hepnu Nur, dkk, Mengenal dan Mendeteksi Pola Korupsi pada Desa di Indonesia, *Integritas*, Volume 8 No. 2, (2022), <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas>.
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Putri, Adinda Dwi, dkk, Fiqih Siyasa dalam Pembelajaran Islam, *Penelitian Multidisplin*, Volume 2 No. 1 (2024), <https://pdfs.semanticscholar.org/97ec/b11e03859aed9f811bd58338a909d61b8abb.pdf>.

- Rahayu, Siti, Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser, *Ilmu Pemerintahan*, Volume 7 No.4 (2019), <https://portal.fisip-unmul.ac.id/site/?>
- Rahman, Fathur, dkk, Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 Di Jawa Timur), *Integritas*, Volume 4 No.1, (2018), <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/743300>.
- Rizki, Sofyan, Kepala Desa di Desa Sodong, wawancara dengan penulis di kantor Desa Sodong, pukul 14.00 WIB, tanggal 15 Februari 2025.
- Safitri, Rantika, Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Taman Jaya Kecamatan Kota Bumi Selatan), *Petitum*, Volume 2 No.1, (2022), <https://juma.umko.ac.id/index.php/petitum/article/view/343>.
- Setiawan, Zenal dan Irwansyah, Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah, *Jurnal Cerdas Hukum*, Volume 2 No.1, (2023), <https://ejournal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/jurnal-cerdashukum/article/view/>.
- Shahmi, Mohammad Aliman, Satu Dekade Dana Desa: Janji Pembangunan yang Terkikis Korupsi dan Birokrasi, *Kompas.Com* 29, diakses pada tanggal 15 Oktober 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/04/11243001/satu-dekade-dana-desa-janji-pembangunan-yang-terkikis-korupsi-dan-birokrasi>.
- Sianturi, Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2018.

Siregar, Mangihut, *Antikorupsi*, Jawa Timur: UWKS Press, 2023.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Al-Fabeta, 2013.

Suhti, *Eksistensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Sesuai Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.

Sutarna, Iwan Tanjung, dkk, Korupsi Dana Desa dalam Perspektif Principal-Agent, *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, Volume 4 No.2, (2023), doi:10.47134/villages.v4i2.52

Tari, Oktaviani, dkk, Jumlah Kabupaten Dan Kota di Indonesia 2023, *Kompas.Com* 29, 2023, diakses 15 Oktober 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/31/00150051/jumlah-kabupaten-dan-kota-di-indonesia-2023>

Wiliam, Sule, Pendamping Desa di Desa Sodong, wawancara dengan penulis di kantor Desa Sodong, pukul 12.30 WIB, tanggal 11 Februari 2025.

Zakaria, Rizki, Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi, *Antikorupsi*, Volume 6 No. 2, (2020), <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/670/115>.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Sule William

Narasumber : Pendamping Desa Sodong

Waktu : Selasa, 11 Februari 2024, pukul 12.30 WIB

Apakah benar pak di Desa Sodong ini pernah terjadi kasus korupsi dana desa?

Jawab : Iya benar, sebelum saya menjabat sebagai Pendamping Desa di Desa Sodong ini pernah terjadi kasus korupsi sekitar tahun 2021 dengan jumlah uang yang dikorupsinya itu sekitar 418 juta.

Siapa saja yang terlibat melakukan korupsi dana desa Sodong?

Jawab : Yang melakukan korupsi ini kepala desa sama kepala urusan keuangan desa, mereka berdua ini masih satu keluarga, jadi kepala desa ini bapaknya dan kepala urusan keuangan desa ini anaknya.

Apa penyebab kepala desa dan kepala urusan keuangan desa di Desa Sodong ini melakukan korupsi dana desa?

Jawab : Intinya penyebabnya karena kelalaian kepala desa dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala desa, sama partisipasi masyarakatnya ini kurang.

Nama : Mery Maria

Narasumber : Kepala Urusan Keuangan Desa Sodong

Waktu : Selasa, 11 Februari 2024, pukul 14.30 WIB

Apa penyebab kepala desa dan kepala urusan keuangan desa di Desa Sodong ini melakukan korupsi dana desa?

Jawab : Penyebabnya itu yang dikatakan pendamping desa benar pertama karena kelalaian kepala desa dalam mengatur desa, kurangnya pemahaman terkait keuangan desa tau tidak dibukukan, kurangnya pengawasan ketat terhadap desa, kurangnya memahami undang-undang tentang desa kan didalam undang-undang desa ini menjelaskan cara mengelola pemerintahan desa jadi bisa dikatakan kepala desa sebelumnya ini tidak memahami undang-undang tersebut.

Nama : Askolani

Narasumber : KASI Pemerintahan Desa

Waktu : Selasa, 11 Februari 2024, pukul 15.30 WIB

Bagaimana awal ketahuan terjadinya korupsi dana desa di Desa Sodong ini terjadi korupsi dana desa?

Jawab : karena saya merupakan aparat Desa Sodong dengan mantan kepala desa sebelumnya, jadi saya tahu awal ketahuannya mantan kepala desa melakukan korupsi itu ketika ada pembinaan keuangan yang mana pembinaan keuangan ini harus diperiksa setiap tahun. Ketika melakukan pembangunan, bangunan yang dibangun ini dikurangi seperti yang tadinya harus dibangun 500 meter malah jadi 300 meter.

Apa penyebab kepala desa dan kepala urusan keuangan desa di Desa Sodong ini melakukan korupsi dana desa?

Jawab : Yang saya ingat waktu saya menjabat sebagai kepala seksi pemerintahan desa dengan sebelumnya, keuangan desa ini tidak didata atau tidak dibukukan jadi keuangan ini berantakan, sehingga menjadi kesempatan mereka berdua melakukan korupsi. Jadi intinya ini akibat kelalaian kepala desa sama kepala urusan keuangan desa.

Nama : Ahmad Mahfudi

Narasumber : RT Desa Sodong

Waktu : Selasa, 11 Februari 2024, pukul 16.30 WIB

Apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Sodong ini?

Jawab : Dampaknya terhadap masyarakat ini ada, karena saya merupakan perwakilan dari masyarakat juga, jadi dampaknya itu kaya aparat desa sebelumnya seperti RT/RW, linmas, kader, dan yang lainnya ini pada dipecat, jadi kepengurusan yang sekarang ini pada baru cuman ada beberapa yang yang bertahan, masyarakat juga pada kurang percaya terhadap pemerintahan desa sekarang, terus korupsi dana desa juga mencoreng nama baik Desa Sodong.

Nama : H. Sofyan Rizki

Narasumber : Kepala Desa Sodong

Waktu : Sabtu, 15 Februari 2024, pukul 14.00 WIB

Untuk memastikan apakah benar pak, di Desa Sodong ini yang melakukan korupsi mantan kepala desa dan kepala urusan keuangan desa?

Jawab : Iya benar, sebelum saya menjabat kepala desa sekarang kepala desa sebelumnya ini melakukan korupsi bersama kepala urusan keuangan desa.

Apa penyebab korupsi Di Desa Sodong yang bapak ketahui?

Jawab : Yang saya ketahui itu karena kelalaian kepala desa, keuangannya tidak dibukukan, yang terakhir karena kepala desa sebelumnya tidak memahami undang-undang tentang desa, karena kalau kita memahami undang-undang tentang desa pasti tidak sampai akan melakukan korupsi.

Apa upaya untuk dijadikan sebagai solusi agar tidak terjadi korupsi dana desa?

Jawab : menurut saya solusi agar terhindar dari korupsi dana desa, pertama menerapkan undang-undang tentang desa, mengawasi tata pengelolaan keuangan, memperbaiki hubungan kepala daerah atau masyarakat dengan aparat desa lainnya, yang terakhir partisipasi masyarakat.